

---

## MENCIPTAKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BAIK DI INDONESIA

**Deding Ishak**

STAI YAPATA Al-Jawami Bandung

Email: [dedingishak@yahoo.com](mailto:dedingishak@yahoo.com)

### Abstrak

Pendidikan hanya bisa diubah oleh masyarakat itu sendiri. Pendidikan merupakan gambaran dan citra dari masyarakat itu sendiri sehingga jika baik kualitas pendidikan maka baik pula kualitas masyarakat tersebut. Oleh sebab itu perlu diciptakan suatu kebijakan pendidikan yang lebih baik yang tidak hanya berfokus kepada teori akan tetapi berbasis pengembangan kompetensi peserta didik. Salah satu upaya dalam menciptakan kebijakan pendidikan adalah dengan melibatkan antara pendidikan dan politik karena pendidikan saat ini tidak dapat di pisahkan dari politik. Berbagai kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh menteri Nadiem Makarim sering kali mendapat benturan politik yang berasal dari Anggota dewan dan juga beberapa ormas. Hal ini mencerminkan politik memainkan peranan penting dalam menentukan kebijakan pendidikan. Keberhasilan generasi yang akan datang tidak dapat dilepaskan dari generasi hari ini dan pendidikan yang didapatkan. Dapat dikatakan politik dapat membuat pendidikan di suatu negara menjadi lebih baik atau sebaliknya.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Politik, Masyarakat.

### Abstract

*Education can only be changed by society itself. Education is a picture and image of the community itself so that if the quality of education is good, the quality of the community is also good. Therefore, it is necessary to make an educational policy that does not only focus on the theory that will be developed by students. One of the efforts in creating education policy is to involve education and politics because education today cannot be separated from politics. Various education policies launched by the minister Nadiem Makarim often receive political visits from members of the council and also several mass organizations. This affects an important role in determining education policy. The success of future generations cannot unlock today's generation and the education it receives. It can be said that politics can make education in a country better or vice versa.*

**Keywords:** Education Policy, Politics, Society.

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting karena kualitas pendidikan seseorang sering digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasannya. Pendidikan adalah sarana lain yang dengannya manusia dapat mencapai tujuan mereka. Jelas bahwa kebijakan pemerintah berdampak pada sistem pendidikan. Kebijakan adalah keputusan eksplisit dan dapat ditegakkan secara hukum yang dibuat oleh organisasi untuk mengatur perilaku guna menanamkan cita-cita baru di masyarakat (Solichin, 2015). Akibatnya, kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi perilaku perusahaan atau masyarakat yang bersangkutan. Dalam kebanyakan kasus, tindakan proaktif efektif dalam memecahkan masalah. Politik berbeda dari undang-undang atau peraturan karena lebih terbuka untuk interpretasi dan kurang preskriptif. Kebijakan harus memiliki cakupan yang luas tanpa mengabaikan kekhususan setiap lokasi. Kebijakan harus

cukup fleksibel untuk memungkinkan interpretasi berdasarkan keadaan saat ini (Muzammil, 2016).

Kebijakan sering digunakan dalam kaitannya dengan aktor, lembaga pemerintah, dan perilaku umum. Kebijakan sering dikaitkan dengan politik karena implikasi dan tindakan politiknya. Dengan kata lain, kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Pada akhirnya, kebijakan publik adalah tentang pencapaian tujuan (Ali, 2017). Lester dan Stewart menyatakan bahwa kajian kebijakan publik saat ini meliputi tahapan-tahapan seperti agenda setting, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, reformasi kebijakan, dan penghentian kebijakan (Eryanto & Rika, 2014). Pelaksanaan kebijakan melibatkan lima langkah: mendefinisikan agenda, merumuskan kebijakan, mengadopsi kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasinya. Kelima langkah ini berurutan secara hierarkis dan memerlukan pengelolaan dan pengendalian oleh pembuat kebijakan yang juga pelaksana. Mengikuti proses pembuatan kebijakan di atas berarti harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi (Winarno, 2017).

Sistem pendidikan Indonesia hampir sama dengan negara lain, Anda harus lulus taman bermain, sekolah dasar selama enam tahun dan sekolah menengah pertama dan atas selama 6 enam tahun juga setelah itu kebanyakan 4 tahun untuk menyelesaikan studi sarjana. Mata pelajaran yang diajarkan guru ketika kita mulai sekolah seperti Matematika, Biologi, Fisika dan ilmu alam lainnya. Guru adalah orang yang memimpin kita untuk setiap keputusan dalam kehidupan sekolah kita (Ilham, 2019).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia baru-baru ini mengubah sistem kurikulumnya. Mereka berubah mengikuti karakteristik siswa Indonesia itu sendiri. Dengan sekitar 55 juta siswa, 3 juta guru, dan lebih dari 236.000 sekolah di 500 kabupaten, Indonesia memiliki sistem pendidikan terbesar keempat di dunia. Tetapi sistem tidak bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Banyak orang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan karena faktor keuangan dan beberapa sekolah di daerah pedesaan masih tertinggal. Fasilitas di perkotaan jauh lebih baik daripada di pedesaan (Syafii, 2018).

Pendidikan dan politik adalah dua istilah yang berbeda dalam suatu negara tetapi pada umumnya merupakan dua bagian penting yang mempengaruhi perkembangan suatu negara dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa semua kebijakan pendidikan dibuat dengan baik oleh pemerintah dan memainkan peran politik di daerah ini. Banyak kritikus mengatakan bahwa mereka berharap politik tidak akan masuk dan mempengaruhi sistem pendidikan karena tujuan pendidikan hanya untuk memberikan pengetahuan bagi semua orang (Susetyo, 2005).

Untuk menjaga identitas komunitas mereka, orang-orang tertindas mencoba untuk membagi pendidikan dan politik. Itulah yang terjadi di pesantren-pesantren Indonesia, khususnya pesantren. Beberapa pemerintah tunduk pada minoritas dan tekanan agama, sementara yang lain menolak untuk membakukan pendidikan untuk menghindari perpecahan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengizinkan kelompok etnis dan agama untuk membuat sekolah sendiri, termasuk sekolah bahasa Arab, sekolah Cina, Kristen, Islam, Budha, dan Hindu. Pemerintah memahami bahwa sebagai suku bangsa terbesar di dunia dan negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semua agama, banyak suku dan agama ingin membangun sistem pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip agama mereka, yang didukung oleh pemerintah selama masih dipegang teguh. ideologi dan peraturan pendidikan Indonesia (Purwanto, 2008).

Kita dapat melihat bahwa pemerintah juga berusaha keras untuk membuktikan keberadaan mereka di bidang pendidikan, peraturan tentang pendidikan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, pasal (2) bahwa pemerintah berusaha dan menciptakan nasional sistem pengajaran yang berdasarkan konstitusi. Dari penjelasan di atas pemerintah memberikan instruksi bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjamin semua warga negara mendapatkan sistem pendidikan yang

lebih baik, selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pengajaran nasional. Kepedulian pemerintah di bidang pendidikan juga terlihat dalam alokasi dana pendidikan dari APBN, hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjamin setiap rakyat mendapatkan pendidikan yang layak. Namun sayangnya tidak semua orang beranggapan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan. Apalagi pemerintah juga belum memastikan alokasi dana yang benar (Mahluddin, 2019).

Tujuan dari penelitian analitik ini adalah untuk membuka jalan bagi bantuan bersyarat berdasarkan diagnosis obyektif dari situasi dan kebutuhan saat ini, untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi untuk pengembangan sistem pendidikan di Indonesia di masa depan. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang pentingnya proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang baik dalam sistem pendidikan dan bagaimana dampak politik yang mempengaruhi setiap keputusan tentang sistem pendidikan di Indonesia.

## **B. METODE**

Metode dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan sumber data penelitian berupa studi literatur. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memastikan bahwa masalah utama penelitian dapat dipastikan (Sugiyono, 2011). Masalah utama penelitian di sini adalah untuk menjelaskan bagaimana menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih di Indonesia dengan melihat kebijakan pendidikan yang sedang berjalan dan pengaruh politik dalam sistem kebijakan pendidikan. Alasan utama pemilihan metode studi literatur adalah untuk mengatasi kompleksitas yang terkait dengan dampak kehadiran politik di Indonesia dalam kaitannya dengan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Masalah penelitian juga akan dijawab dengan pengumpulan data, wawancara, analisis isi dokumen, ini akan mencoba untuk fokus memahami dan menjelaskan makna dari fenomena sosial yang terjadi di negara ini, khususnya dalam hak atas pendidikan. Metodologi yang penulis gunakan juga untuk menganalisis dampak negatif pengaruh politik terhadap masa depan generasi muda kita akibat buruknya sistem pendidikan. perbaiki sistem pendidikan kita dengan kebijakan pemerintah yang baik.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kebijakan pendidikan di Indonesia**

Dalam kebijakan pendidikan, efektivitas biaya dan efisiensi anggaran saling terkait. Implementasi kebijakan membutuhkan penilaian yang cermat terhadap sumber daya manusia dan fisik serta kelebihan dan kekurangan kebijakan. Normatif, struktural, konstitutif, dan teknis merupakan empat dimensi kebijakan pendidikan. Dimensi normatif ada dalam nilai, standar, dan ideologi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di masyarakat harus diperbaiki atau diubah. Dimensi struktural diperlukan untuk menopang dimensi tersebut (Munadi & Barnawi, 2011). Ukuran pemerintah dan sarana dan prosedur yang digunakan untuk menerapkan kebijakan pendidikan semuanya termasuk dalam kategori ini. Konstituen adalah orang-orang, kelompok, dan organisasi yang memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Sementara itu, kebijakan pendidikan Indonesia lebih mengandalkan model analisis kebijakan berdasarkan asumsi politik. Banyak indikator menunjukkan hal ini. Untuk memulai, ada inkonsistensi dalam asumsi yang mendasari tantangan pendidikan. Keberagaman dan heterogenitas, serta karakter dan konteks yang disebut sekolah, tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Akibatnya, tidak mengherankan jika kita membahas sistem pendidikan, sebenarnya kita sedang membahas sistem sekolah (Bakry, 2010).

Berdasarkan temuan tersebut, banyak ahli menjelaskan bahwa hasil kebijakan Indonesia didasarkan pada asumsi politik, sementara beberapa praktisi menyatakan bahwa

mereka menggunakan lebih banyak model analisis kebijakan berdasarkan asumsi politik. Namun, tidak semua kebijakan pendidikan dibuat dengan cara ini; banyak dibuat dalam menanggapi analisis dan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul, termasuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi dan merumuskan beberapa alternatif solusi untuk masalah yang diangkat selama perumusan model analisis kebijakan pendidikan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diberikan bermanfaat bagi semua orang. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, selain bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Karena kebijakan pendidikan bersifat kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam guna mengembangkan pendidikan yang komprehensif dan integratif (Harisah, 2018).

James Anderson membagi nilai-nilai ini menjadi lima kategori: nilai politik, nilai organisasi, nilai kebijakan, dan nilai ideologis. Hasil keputusan akan dipengaruhi oleh kelima nilai tersebut. Salah satu nilai yang paling berpengaruh terlihat dalam evaluasi kebijakan. Menggunakan metode yang sistematis, atau evaluasi evaluasi, yang dapat mengevaluasi evaluasi lebih baik dari evaluasi lainnya. Memahami kebijakan pendidikan yang mempengaruhi administrasi sekolah. Paradigma pendidikan universal dengan demikian tampak lebih mudah beradaptasi daripada inisiatif. Kedua, kurang kontekstual ketika menganalisis kebijakan pendidikan secara keseluruhan dan kebijakan terpadu yang memberikan prinsip-prinsip yang jelas untuk pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sebuah "sinergi" bukanlah komponen "dikotomis" dalam kebijakan pendidikan. Artinya, apakah perumusan kebijakan pendidikan sudah memenuhi semua kriteria kebijakan atau ada yang masih di luar jangkauan? (Irianto, 2011).

## **2. Menciptakan Kebijakan Pendidikan yang Lebih Baik di Indonesia**

Pendidikan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh politik karena kebijakan dan pengaturan sistem pendidikan dibuat oleh penguasa dan proses pengambilan keputusan untuk membuat satu kebijakan memerlukan banyak upaya politik untuk mencapainya. Politik uang atau tidak akan berdampak pada generasi muda yang menghabiskan banyak waktu di sekolah dan mewujudkan impiannya di masa depan. Politik dan pendidikan sebenarnya selalu berkaitan satu sama lain misalnya seorang kepala sekolah kejuruan yang memutuskan kebijakan pola magang bagi siswanya apakah keputusan tersebut merupakan keputusan politik atau tidak masih dalam pembahasan (Purwanto, 2008).

Berbicara tentang relevansi pendidikan dan politik, di sekolah kebijakan pendidikan formal telah ditetapkan dari pemerintah pusat meskipun secara luas menerapkan otonomi pendidikan, oleh karena itu hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengubah peraturan tersebut. Namun, betapapun politisnya masalah pendidikan, guru, yang ditugasi dengan eksekusi akhir dari kebijakan baru, sering menahan diri untuk tidak memandang diri mereka sebagai aktor politik. Bahkan ketika beberapa anggota profesi marah terhadap tes, atau proposal evaluasi guru tertentu, atau sejumlah kebijakan lainnya, banyak yang tidak menginginkan label "politik".

Sebagai orang yang paling penting dalam sistem pendidikan, dapatkah guru dipisahkan dengan pengaruh politik? Akan sulit untuk menjawabnya bahkan sangat jelas bahwa guru tidak dapat mempengaruhi siswanya untuk mengikuti beberapa pihak atau beberapa aktor di dalam, itu akan menjadi kampanye negatif untuk menarik pengikut tetapi pemerintah tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi di kelas. Jika siswa menjadi buruk kita dapat mengatakan guru juga bertanggung jawab untuk hal ini tetapi bagaimana dengan politik, sangat mudah untuk mempengaruhi guru karena mereka dekat juga dengan siswa.

Politik adalah landasan untuk membuat kebijakan dalam aspek lain seperti ekonomi, sosial, hukum, budaya, keamanan dan pertahanan sehingga tidak akan ada bedanya dengan aspek pendidikan karena proses pengambilan keputusan ada di pemerintah pusat itulah

sebabnya sistem kami Pendidikan masih terkait dengan seberapa buruk dan baik kebijakan menuju pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga negara di Indonesia. Di Indonesia pemerintah juga melakukan banyak upaya untuk memberantas masalah pendidikan, pemerintah melakukan upaya dalam kebijakan terhadap pendidikan misalnya implementasi budaya bangsa dan pendidikan karakter, peningkatan profesional guru, pembaruan kurikulum dan implementasi (Solichin, 2015).

Pemerintah berusaha keras untuk memobilisasi dengan kemauan masyarakat untuk sistem pendidikan yang lebih baik, itu sebabnya seperti perubahan kurikulum atau mungkin penarikan departemen pendidikan kita benar-benar terlihat seperti politik mempengaruhi reformasi pendidikan di Indonesia. Kami hanya ingin misi pemerintah untuk memberikan generasi muda kita sistem terbaik untuk membantu mereka di lapangan pekerjaan di masa depan tanpa minat lebih lanjut tetapi sepertinya pemerintah perlu melakukan banyak upaya untuk pengembangan sistem pendidikan kita (Rosad, 2019).

Pada tahun 2005, Indonesia menerapkan undang-undang guru untuk meningkatkan kualitas gurunya. Di bawah undang-undang baru, guru harus mendapatkan sertifikasi dengan menyelesaikan gelar sarjana 4 tahun dan terus meningkatkan keterampilan mereka, sebuah program yang mendukung pemerintah untuk melaksanakan reformasi manajemen mutu guru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Guru. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pada tahun 2005 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Guru, sebuah undang-undang komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas guru. Hal ini membuat perbaikan yang baik untuk sistem pendidikan yang lebih baik karena guru memainkan peran penting untuk mengembangkan keterampilan siswa dan bagaimana mereka dapat mengubah pola pikir orang berdasarkan metode pengajaran guru. Kualitas guru merupakan salah satu isu penting dalam sistem pendidikan karena guru adalah alat bagi kita untuk mempelajari suatu ilmu karena jika gurunya buruk maka siswanya akan buruk juga, jika siswanya baik dan pintar pasti siswanya akan menjadi sama juga (Musfah, 2012).

Banyak sekali regulasi yang memberikan dampak besar bagi masyarakat dan menunjukkan betapa politik memainkan peran penting bagi pendidikan, kebijakan tersebut adalah UU 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dll. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah melakukan banyak pembenahan terhadap undang-undang pendidikannya, ini hanya beberapa contoh bahwa pemerintah menempatkan posisi mereka sebagai pemegang kekuasaan sehingga mereka dapat melakukan perbaikan atau mungkin mereka juga yang membuat sistem pendidikan di Indonesia menjadi buruk. Orang cenderung berpikir bahwa tidak semua orang mendapatkan dampak dari peraturan semacam ini masih banyak masalah tentang sistem pendidikan kita seperti kualitas guru, pendapatan guru yang tidak seimbang untuk beberapa daerah dan guru tidak mendapatkan apa-apa. layak, sekolah rusak, seragam mahal dan buku dan banyak lagi. Memang benar bahwa membuat aturan adalah esai tetapi juga sulit untuk mempertahankannya dan bagaimana mereka memastikan bahwa semua orang berhak mendapatkan hal yang sama dan orang-orang di provinsi lain yang jauh dari ibu kota akan mendapatkan hal yang sama terutama di mana mereka tinggal, beberapa desa yang jauh dari kota.

Politik dapat menjadi alat untuk mengakses sistem pendidikan yang lebih baik karena semua kebijakan yang dibutuhkan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sistem pendidikan harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Ini adalah model yang ingin penulis usulkan dan bagaimana politik dapat memainkan perannya di sini.

#### 1. Fokus pada subjek

Paradigma ini berarti bahwa guru tidak akan memaksa siswa untuk mencapai nilai setinggi mungkin dalam mata pelajaran yang tidak mereka sukai karena akan merusak kepercayaan diri mereka di masa depan. Sebagai contoh, di institusi saya, saya memiliki seorang teman yang sangat menyukai seni dan musik sehingga dia hanya mengikuti kelas yang

dia sukai. Dia fokus pada mimpinya, mendapat kesempatan untuk merekam, dan saat ini adalah musisi top Indonesia. Contoh ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang dan gengsi, tetapi juga tentang melakukan apa yang kita sukai. Hal ini dapat meningkatkan peluang siswa untuk menampilkan seni dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya selain Matematika, Fisika, dan Kimia. Untuk mengembangkan kebijakan bahwa ujian nasional di semua mata pelajaran utama seperti Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris dan Indonesia bukan satu-satunya ukuran kelulusan sekolah menengah, politik dapat berperan. Gagasan bahwa 3 tahun kehidupan siswa bergantung pada satu hari ujian nasional telah banyak dikritik.

## 2. Subyek Moral

Penting untuk mengajari orang Indonesia bagaimana memperlakukan satu sama lain berdasarkan identitas agama mereka. Benar, akademisi itu penting, tetapi begitu juga hubungan antara orang-orang. Anda akan membutuhkan jaringan untuk membangun jaringan Anda dan berkomunikasi satu sama lain untuk setiap pekerjaan yang akan Anda dapatkan nanti. Pendidikan selalu memiliki dua tujuan utama: menjadikan manusia lebih cerdas dan manusia yang lebih baik (*good*). Menjadikan seorang pria cerdas dan cerdas mungkin sederhana, tetapi membuat seseorang menjadi baik dan bijaksana tampaknya lebih sulit. Dengan demikian, masalah moral adalah akar dari semua masalah.

## 3. Tidak ada Belajar Paksa

Profesi guru sendiri merupakan profesi yang sangat dihargai, meski gaji mereka tidak fantastis. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya hanya mendaftar untuk masuk di sekolah pendidikan, dan hanya 1 dari 7 pelamar yang dapat diterima. Menurut saya, sistem seperti ini sangat cocok untuk mentalitas masyarakat Indonesia. Kita mendengar berita bunuh diri siswa karena berkali-kali gagal dalam ujian dan kasus suap untuk ujian nasional karena jika kita berbicara tentang sistem Indonesia, yang tidak fokus pada proses tetapi fokus pada hasil seperti ujian nasional.

## 4. Program Pelatihan Guru

Guru adalah salah satu elemen penting jika kita ingin memperbaiki sistem pendidikan kita, guru yang baik akan menghasilkan siswa yang baik. Semua setuju dengan itu, oleh karena itu guru memiliki tugas moral untuk berbagi ilmu dan membangun karakter siswa. Mereka harus dievaluasi tidak hanya pada berapa jam seminggu mereka mengajar, tetapi pada seberapa baik kinerja siswa mereka. Hampir pasti, guru membutuhkan pelatihan yang lebih baik. Dari lebih dari 400 lembaga pelatihan guru di Indonesia, tidak lebih dari sepersepuluh sudah bagus. Oleh sebab itu pemerintah ingin meningkatkan lembaga pelatihan kejuruan Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, sebagai cara untuk meningkatkan tenaga kerja terampil di bidang manufaktur dan membantu mereka yang berada di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian dan kelautan.

## D. KESIMPULAN

Pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh sebab itu pemilihan model formulasi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masalah seperti akses sekolah, distribusi instruktur yang tidak merata, dan kualitas guru tersebut menjadi perhatian utama. Dalam reformasi pendidikan, kita membutuhkan pendidik dan peneliti yang telah menghayati, mempraktekkan, dan berpikir secara mendalam tentang apa yang harus dicapai pendidikan untuk orang-orang yang bebas, hambatan apa yang menghalangi peningkatan hasil pendidikan untuk semua anak (hambatan yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan anak-anak di luar kelas), dan apa cara terbaik untuk menumbuhkan budaya yang mendukung dan merangkul sistem yang ada saat ini. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Bahkan dalam masyarakat yang

terglobalisasi, masih ada fakta bahwa tidak semua negara melakukan hal yang sama, atau beberapa bahkan lebih baik dari yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Eryanto, H., & Rika, D. (2014). Evaluasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di DKI Jakarta Pada Periode 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 12(1), 44-82.
- Harisah, A. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip dan Dasar Pengembangan*. Deepublish.
- Ilham, D. (2019). Menggagas pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109-122.
- Irianto, Y. B. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model*. Rajawali Pers.
- Mahluddin, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Kota Jambi: Kasus Pemerintah Daerah Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan SMA di Kota Jambi. *Primary Education Journal (PEJ)*, 3(1).
- Munadi, M. (2011). Barnawi. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. *Jogjakarta: Ar-Ruz Media*.
- Munadi, M., & Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzmedia.
- Musfah, J. (2012). *Peningkatan kompetensi guru: Melalui pelatihan dan sumber belajar teori dan praktik*. Kencana.
- Muzammil, A. A. (2016). Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru. *Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 183-98.
- Purwanto, N. A. (2008). Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 114488.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173-190.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo, B. (2005). *Politik pendidikan penguasa*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171.
- Winarno, E. (2017). Kompleksitas Proses Kebijakan Sosial. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 255-268.